



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Dr. Sutomo No. 53 Blitar Telp/Fax (0342) 801243

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP TAHUN 2024



bakesbangpol@blitarkab.go.id

www.bakesbangpol.blitarkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024**" dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan LKJIP Tahun 2024 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan berbagai kewajiban tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan terkait hasil pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR



Ir. SENYANA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680810 199703 1 003



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024”** dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan LKJIP Tahun 2024 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan berbagai kewajiban tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan terkait hasil pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR

Ir. SETIYANA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680810 199703 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum SKPD.....	3
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan.....	7
D. Landasan Hukum Penyusunan	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026.....	11
B. Perjanjian Kinerja 2024.....	16
C. Program dan Kegiatan	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengaruh globalisasi dan akses informasi yang tak terbatas dari sosial media.

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang profesional, bersih, berwibawa dan bersikap mental positif melalui program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, teknik yang efektif dan sistem administrasi modern.

Setiap pelaksanaan urusan pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKJIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Target kinerja yang harus dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi SAKIP Tahun 2023 telah dijadikan masukan perbaikan pada LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Perbaikan yang dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain 1) Melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala; 2) Meningkatkan kualitas laporan kinerja 3) Melaksanakan Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja secara keseluruhan dan 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil evaluasi internal untuk dapat mengawal perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan kinerja utama (*outcome*) organisasi yang lebih baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran



organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas melakukan pelayanan di Bidang peningkatan Stabilitas daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya. Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana untuk pertama kalinya kita melaksanakan pemilu serentak. Hal ini merupakan tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam pelayanan untuk mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024. Melalui desk Pemilu dan Pilkada diharapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada berjalan lancar dan hambatan dapat diatasi sedini mungkin.

Dalam pelaksanaan pelayanan, bentuk pelayanan yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memang tidak langsung menyentuh kepada masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi bila suatu wilayah tidak memiliki pondasi yang kuat akan stabilitas di bidang ekonomi, sosial dan budaya maka kegiatan lainnya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh yang sering terjadi manakala suatu OPD di demo oleh masyarakat maka OPD tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatan lain dengan optimal. Begitu juga bila terjadi konflik sosial di masyarakat, penggunaan sosial media dengan informasi yang dapat diakses tanpa batas akan menimbulkan kerawanan akibat perbedaan persepsi, yang akan berdampak pada konflik sosial.

B. Gambaran Umum SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas :



“Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik”

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memiliki fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan;
- i. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. pengoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh

langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Adapun permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diantaranya :

- a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah.
- b. Masih sering terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang berkaitan dengan IPOLEKSSOBUD.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.
- d. Masih rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program – program pemerintah daerah

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan strategi yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
- b. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik dan kehidupan politik serta perluasan informasi publik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas.
- d. Pemberdayaan Ormas/LSM dalam rangka pembangunan di daerah.

Dengan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tersebut di atas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan.

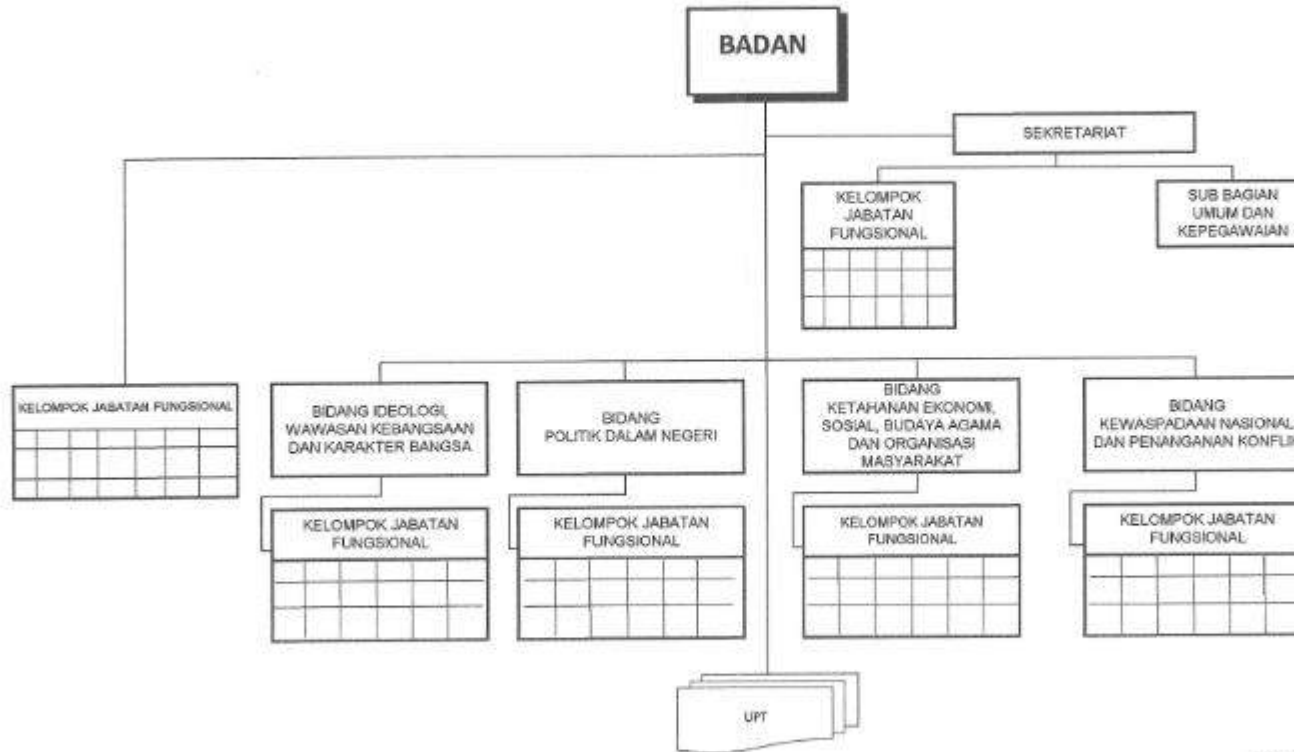


- b. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui forum-forum (FKDM, Tim Wasdin, FKUB dan FPK).
- d. Peningkatan pembinaan terhadap Ormas/LSM melalui sosialisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, maka ditetapkan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Umum dan Kepegawaian; dan
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR**



BUPATI BLITAR,
ttd
RINI SYARIFAH



C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai laporan hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. LkjIP juga merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.



D. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- s. Peraturan Bupati Blitar tentang
- t. Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

E. Sistematika Penyajian

LKjIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Result*) pada tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika Penyajian LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum SKPD
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan
- D. Landasan Hukum Penyusunan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perubahan Anggaran dan Kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 didasarkan pada : (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026; (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (4) Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026; dan (5) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024;

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026

1. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2021 - 2026

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR”.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Semangat kemandirian dan



kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, dan, kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Sementara itu, misi Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas;
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2021 – 2026 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsinya mendukung Misi I Kabupaten Blitar yaitu

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”.

Misi I Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PMKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berperan dengan cara mewujudkan wilayah Kabupaten Blitar yang aman dan kondusif serta saling



menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I ditetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsinya Bakesbangpol Kabupaten Blitar mendukung sasaran ke 2 dengan yaitu Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial, dimana tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah Mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya).

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024, Bakesbangpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan penghitungannya berada pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Adapun capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Indikator Kesalehan Sosial
Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82 (Sangat Tinggi)	84,09 (Sangat Tinggi)	84* (Sangat Tinggi)	84,23 (Sangat Tinggi)	86 (Sangat Tinggi)	84,61 (Sangat Tinggi)

**Keterangan : Target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026*

Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kesalehan Sosial. Pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dari target tahun 2024 sebesar 86 terealisasi sebesar 84,61 atau dengan capaian sebesar 98,3%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti. Adapun dimensi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Kerjasama terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja
- b. Solidaritas Sosial terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving).
- c. Toleransi terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural
- d. Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

3. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka menengah yakni 1 tahun sampai kurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis.

Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) dari hasil analisis lingkungan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menetapkan tujuan OPD adalah

“Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)”

dengan Indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

NO.	TUJUAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR
1.	Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)”	Indeks Kesalehan Sosial
		Persentase stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;

Indikator Kinerja Utama (*outcome*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang menunjukkan peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam hal Pembinaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Penentuan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan

kegiatan dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedang keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar

B. Perjanjian Kinerja 2024

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai implementasi pelaksanaan dari program. Target tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	86	84,23	86
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	75%	80%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB (75,3)	BB (75,16)	BB (75,3)

C. Program dan Kegiatan

Pencapaian 4 (empat) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar untuk Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 di atas dicapai melalui 6 (enam) program pembangunan sebagaimana tertuang pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5 Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	IKU	Program	Target Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	1.000.399.999
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	84%	107.865.688
2.	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90%	1.126.598.500
3.	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80%	57.987.983.832
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27%	2.745.002.232
4.	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	3.380.503.014

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- 1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- d. Pembentukan Paskibraka
- e. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

IV. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

V. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;



- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

1. Perbandingan antara target realisasi dan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Perbandingan antara target realisasi dan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya serta perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	86	84,61	98,3%
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	80%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB (75,3)	B (66,55)	88,3%

Sumber: Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2026



Berdasarkan Tabel 3.1 disajikan mengenai target, realisasi dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dan Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar. Pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dari target tahun 2024 sebesar 86 terealisasi sebesar 84,61 atau dengan capaian sebesar 98,3%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti.

Sementara itu, untuk indikator Nilai SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dari target tahun 2024 sebesar 75,3 (BB) terealisasi 66,55 (BB) atau dengan capaian sebesar 88,3%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP, sehingga ada beberapa unsur dari indikator yang belum terpenuhi.

2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2024, pengukuran, evaluasi pencapaian dan analisis kinerja dilakukan pada setiap sasaran strategis pembangunan sesuai dengan perjanjian kinerja yang penyusunannya mendasarkan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021–2026.

a. Target dan realisasi Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa

IKU	Realisasi		Capaian 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesalehan Sosial	84,09	84,23	86	84,61	98,3%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024					98,3%



Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator Komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/ Mutualitas dan Aspek Stabilitas/ Ketertiban Umum, Indeks Kesalehan Sosial dihitung dengan formula :

$$\frac{(W_1 \times I_{Kerjasama}) + (W_2 \times I_{Solidaritas\ Sosial}) + (W_3 \times I_{Toleransi}) + (W_4 \times I_{Ketertiban\ Umum})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}$$

Indeks Kesalehan Sosial merupakan salah satu indikator yang mendukung pencapaian visi misi Bupati Blitar. Sehingga dilakukan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana tingkat kesalehan sosial di Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024, Bakesbangpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan penghitungannya berada pada Dinas Kominfo Kabupaten Blitar.

Sasaran strategis “Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Pada Tahun 2024, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar tercapai sebesar 84,61 dari target 86, sehingga presentase capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 98,3%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi

masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti. Adapun dimensi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Kerjasama terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja
- b. Solidaritas Sosial terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving).
- c. Toleransi terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural
- d. Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

Dari 4 (empat) dimensi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar masuk dalam dimensi sebagai berikut :

- a. Toleransi dengan sub dimensi Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural;

Sebagai negara yang mempunyai budaya dan latar belakang yang heterogen, Keragaman dan semangat primordialisme antar penganutnya menjadi sebuah ancaman sekaligus kekuatan dalam stabilitas negara. Terlaksananya komunikasi serta koordinasi antar anggota FKUB dalam rangka penanganan/penyelesaian masalah-masalah keagamaan, konflik antar dan inter umat beragama di Kabupaten Blitar sehingga tingkat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Blitar cukup kondusif. Peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) di Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 berupa kegiatan rapat koordinasi yang membahas isu – isu strategis terkait kerukunan umat beragama serta rapat koordinasi yang membahas isu – isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar.

- b. Ketertiban umum dengan sub dimensi Keterlibatan dalam Demokrasi.

Dalam upaya meningkatkan Keterlibatan dalam Demokrasi masyarakat Kabupaten Blitar, pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula dan Perempuan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2024 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema “Penguatan Kesadaran Demokrasi Terhadap Pemilih Pemula” yang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (kali) yaitu di SMKN 1 Udanawu, SMKN 1 Kademangan dan sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Paskibraka 2024.

Tabel Perbandingan Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar dengan Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Wilayah	Nilai IKS 2024
1.	Kabupaten Blitar	84,61
2.	Nasional	83,83
3.	Kabupaten Lamongan	89,33
4.	Kota Mojokerto	91,67

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan Nasional dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur, nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar lebih tinggi dari capaian Nasional, namun lebih rendah dari Kabupaten Lamongan dan Kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 antara lain usia, tingkat pendidikan, kategori responden serta kedekatan dengan organisasi keagamaan.

b. Target dan realisasi Sasaran Strategis 2:

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat

IKU	Realisasi		Capaian 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	90%	90%	100%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024					100%

Menurut Undang – Undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Sasaran strategis “Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat. Pencapaian Kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat telah mencapai target yang telah ditentukan. Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konflik sosial di masyarakat yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} \times 100$$

$$= \frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Penolakan terhadap keberadaan tambang galian C di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo karena dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan longsor;
- 2) Penolakan terhadap penyewaan bangunan gereja di Desa Penataran Kecamatan Ngleok
- 3) Penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Bendosewu Kecamatan Talun yang diduga telah diintervensi oleh pihak berkepentingan;
- 4) Pemblokiran Jalan Raya Jajagan, Desa Jugi oleh Masyarakat Sekitar karena dilewati kendaraan PT. RMI yang melebihi tonase jalan;
- 5) Keracunan Massal di Ponpes Al-Kautsar Srengat;
- 6) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Camat Talun dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 7) Aksi Walkout oleh Paslon Pilkada Kabupaten Blitar dalam Kegiatan Debat Terbuka Kedua;
- 8) Penemuan Tempat Penampungan Calon TKI ilegal di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi;
- 9) Aksi Unjuk Rasa oleh Konsorsium Pembaruan Agraria terkait Percepatan Reforma Agraria;
- 10) Aksi Unjuk Rasa oleh Front Mahasiswa Revolusioner terkait Penertiban Tambang Ilegal;
- 11) Aksi Unjuk Rasa oleh Gerakan Masyarakat Koalisi Peduli Pemilu (Gasak KPU) terkait dugaan keberpihakan penyelenggara dan pengawas pilkada kepada salah satu Paslon



Namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak yang bertikai sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tabel Perbandingan Tingkat Penanganan Konflik Kabupaten Blitar dengan Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Wilayah	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Tahun 2024 (%)
1.	Kabupaten Blitar	100%
2.	Kota Blitar	100%
3.	Kabupaten Magetan	100%
4.	Kabupaten Malang	81,8%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan Bakesbangpol Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tingkat penanganan konflik di Kabupaten Blitar sama dengan Kota Blitar dan Kabupaten Magetan yaitu 100% dan lebih tinggi dari Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semua konflik yang timbul di Kabupaten Blitar dapat seluruhnya dicegah dan ditangani oleh Bakesbangpol sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

c. Target dan realisasi Sasaran Strategis 3 :

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi.

IKU	Realisasi		Capaian 2024		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	70%	70%	80%	80%	100%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024					100%

Infrastruktur demokrasi adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Fasilitas dasar yang dimaksud adalah masyarakat, partai politik, pemerintah, legislative (DPR/D), pendidikan politik, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, kelompok kepentingan, media.

Sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi. Pencapaian Kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi telah mencapai target yang telah ditentukan. Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah kegiatan penguatan infrastruktur demokrasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan penguatan infrastruktur demokrasi yang direncanakan}} \times 100$
--

$$= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Upaya yang dilakukan demi terwujudnya sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” pada tahun 2024 dilaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada pemilih pemula, pemilih perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih

pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2024 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema “Penguatan Kesadaran Demokrasi Terhadap Pemilih Pemula” yang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (kali) yaitu di SMKN 1 Udanawu, SMKN 1 Kademangan dan sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Paskibraka 2024. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dimana organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek infrastruktur demokrasi.

Untuk indikator tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi tidak dapat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur dikarenakan terdapat perbedaan indikator.

d. Target dan realisasi Sasaran Strategis 4 :

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar

IKU	Realisasi		Capaian 2023		
	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar	BB (71,39)	BB (75,16)	BB (75,3)	B (66,55)	88,3%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024					88,3%

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 88 Tahun 2021, Nilai SAKIP Perangkat Daerah didapatkan dari hasil evaluasi AKIP yang secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar” ini dijalankan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar dari target tahun 2024 sebesar 75,3 (BB) teralisasi 66,55 (B) atau dengan capaian sebesar 88,3%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP, sehingga ada beberapa unsur dari indikator yang belum terpenuhi. Adapun indikator yang belum terpenuhi adalah evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diperoleh capaian sebesar 50% dengan nilai 15. Dari hasil evaluasi pengumpulan data kinerja dan pengumpulan kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), aplikasi SIYAKIN tidak dapat digunakan. Untuk menindaklanjuti hal ini telah dilaksanakan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar dan didapatkan hasil bahwa adanya kendala terhadap aplikasi pengukuran dan evaluasi kinerja (SIYAKIN) dan Bagian Organisasi sedang melakukan pemeliharaan dan pengembangan pada aplikasi SIYAKIN.

Tabel Perbandingan Nilai SAKIP Bakesbangpol Kabupaten Blitar dengan Bakesbangpol Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Wilayah	Nilai SAKIP Tahun 2024
1.	Kabupaten Blitar	66,55
2.	Kota Blitar	85,62
3.	Kabupaten Magetan	87,66

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan Bakesbangpol Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar lebih rendah dari Kabupaten Magetan dan Kota Blitar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Kabupaten Blitar, sehingga ada beberapa unsur dari indikator yang belum terpenuhi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra 2026 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	90	84,61	94,01%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	95%	90%	94,73%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	80%	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB (75,9)	BB (66,55)	87,68%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dan Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar. Pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dari target tahun 2024 sebesar 86 terealisasi sebesar 84,61 atau dengan capaian sebesar 98,3%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti. Sementara itu, untuk indikator Nilai SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dari target tahun 2024 sebesar 75,3 (BB) teralisasi 66,55 (BB) atau dengan capaian sebesar 88,3%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP, sehingga ada beberapa unsur dari indikator yang belum terpenuhi.
- Generasi umur 6 - 25 tahun belum seluruhnya memahami Pancasila dan wawasan kebangsaan serta akses terhadap informasi yang cepat dan tanpa batas (tanpa ada saringan ideologi) mengakibatkan intoleransi terhadap paham tertentu yang dapat melunturkan semangat kebhinekaan
- Kurangnya akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan hibah partai politik
- Kurangnya pemahaman politik bagi masyarakat Kabupaten Blitar
- Kurangnya akuntabilitas kelembagaan dan keuangan organisasi masyarakat dan terdapat sengketa organisasi masyarakat yang belum terselesaikan
- Masih sering terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang berkaitan dengan IPOLEKSOBUD.

- Tahun 2024 merupakan tahun politik sehingga rawan terjadi benturan kepentingan antar pihak.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut di atas adalah :

- Pemupukan jiwa kepahlawanan melalui Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Sosialisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar.
- Workshop administrasi kelembagaan dan keuangan bagi pengurus partai politik, Verifikasi dan monitoring partai politik, Konsultasi dan koordinasi kelembagaan partai politik
- Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik dan kehidupan politik melalui sosialisasi dan perluasan informasi publik.
- Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus organisasi masyarakat, fasilitasi sengketa ormas, pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas, dan Verifikasi dan monitoring ormas.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan terhadap potensi ATHG

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 3. 3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	1.108.265.687	1,67%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	1.126.598.500	1,70%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	60.732.986.064	91,54%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	3.380.503.014	5,10%

Total anggaran belanja langsung pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar Rp. 66.348.353.265,- dari total anggaran tersebut dibagi kedalam 4 (empat) sasaran strategis sesuai dengan prioritas pada tahun 2023. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa” porsi sebesar 1,67% atau sebesar Rp 1.108.265.687,-. Sasaran strategis 2 : “Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat” mendapat porsi anggaran sebesar 1,70% atau sebesar Rp. 1.126.598.500,-. Sasaran strategis 4 : “Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar” mendapat porsi sebesar 5,10% atau sebesar Rp. 3.380.503.014,-.

Sementara itu sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” mendapatkan paling tinggi porsi sebesar 91,54% atau sebesar Rp 60.732.986.064,- hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kegiatan penyaluran bantuan hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, bantuan hibah kepada organisasi masyarakat serta instansi vertikal di Kabupaten

Blitar untuk pengamanan Pemilu Serentak 2024, serta bantuan hibah kepada lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu terkait upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada pada tahun ini digalakkan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan yang bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Blitar guna mendukung sukses Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	86	84,61	98,3%	1.108.265.687	1.107.498.428	99.93 %
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat	90%	90%	100%	1.126.598.500	1.061.220.500	94.20 %
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	80%	100%	60.732.986.064	60.663.205.050	99.89 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB (75.3)	B (66.55)	88.3%	3.380.503.014	3.222.977.392	95.34 %

Adapun perhitungan efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKI \times CKI) - RAKI)}{\sum_{i=1}^n (PAKI \times CKI)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKI : Pagu anggaran keluaran i

RAKI : Realisasi anggaran keluaran i

CKI : Capaian keluaran i

Tabel 3. 5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	98.3%	99.93%	-1.66%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	94.20%	5.80%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	100%	99.89%	0.11%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	88.3%	95.34%	-7.97%

Pada tabel 3.6 di atas. disajikan mengenai tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategis meskipun tidak terlalu signifikan. Pada sasaran strategis 1 “Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa” terealisasi sebesar Rp. 1.107.498.428 (99.93%) dari anggaran sebesar Rp. 1.108.265.687 sehingga tingkat efisiensi sebesar -1.66%. Pada sasaran strategis 2 “Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat” terealisasi sebesar Rp. 1.061.220.500 (94.20%) dari anggaran sebesar Rp. 1.126.598.500 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 5.80%. Pada sasaran strategis 3 “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur

demokrasi” terealisasi sebesar Rp. 60.663.205.050 (99.89%) dari anggaran sebesar Rp. 60.732.986.064 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.11%. Sementara itu Pada sasaran strategis 4 “Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar” terealisasi sebesar Rp. 3.222.977.392 (95.34%) dari anggaran sebesar Rp. 3.380.503.014 sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar -7.97%

6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Dukungan dari berbagai instansi untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh bakesbangpol sangat diperlukan. mengingat stabilitas daerah kinerjanya tidak tampak tapi bisa dirasakan. Bila Bakesbangpol berhasil dalam melaksanakan kegiatannya akan berdampak sistemik kepada kondisi keamanan di Kabupaten Blitar.

Faktor penunjang dalam keberhasilan Bakesbangpol dalam menjalankan kegiatannya antara lain:

- Dukungan dana dari pemerintah daerah yang seluruh kegiatan Bakesbangpol dibiayai oleh APBD Kabupaten Blitar
- Sumberdaya organisasi yang mampu bersinergis dengan jajaran samping, pemangku kepentingan dan stake holder
- Efektifitas penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Permasalahan dan tantangan:

- 1) Tantangan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula.
- 2) Heterogenitas dan semangat primordialisme masyarakat yang rentan terjadi benturan.
- 3) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada:

- 1) Mengoptimalkan peran forum-forum (FKDM, Tim Wasdin, FKUB dan FPK) yang ada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan untuk mengantisipasi potensi timbulnya gejolak di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.



- 2) Meningkatkan kegiatan FKUB (forum kerukunan umat beragama) dan FPK (forum Pembauran Kebangsaan) ke arah pemberdayaan organisasi yang dapat mengubah perberdaan menjadi keunggulan kompetitif.
- 3) Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
- 4) Mengefektifkan peran Tim Koordinasi dan Pokja P4GN di Kabupaten Blitar.
- 5) Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemilu dengan bekerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) guna mendukung dan menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar didukung dengan anggaran yang memadai. baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada Tahun Anggaran 2024 sumber dana untuk Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berasal dari anggaran APBD termasuk PAK adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja pegawai	2.398.607.120	2.276.136.520	94,89	2.530.668.865	2.408.627.627	95,18
Belanja barang dan jasa	3.975.963.000	3.896.255.466	98,00	3.841.178.585	3.705.199.583	96,46
Belanja Hibah	38.192.205.200	38.190.258.326	99,99	59.887.356.160	59.857.774.160	99,95
Belanja modal dan peralatan dan mesin	0	0	0	87.990.225	83.300.000	94,67
Belanja modal gedung dan bangunan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	44.566.775.320	44.362.650.312	99,54	66.347.193.865	66.054.901.370	99,56

Anggaran tahun 2024 pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar adalah sebesar Rp. 66.347.193.865,- anggaran tersebut digunakan untuk belanja



pegawai sebesar Rp. 2.530.668.865,- . belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.705.199.583,- dan belanja hibah kepada parpol. ormas. instansi vertikal dan lembaga penyelenggara Pemilu sebesar Rp. 59.887.356.160,-. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 66.054.901.370,- atau sekitar 99,56%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah anggaran Rp. 44.566.775.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.362.650.312,- atau sekitar 99,54%. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi anggaran pada Bakesbangpol Kab. Blitar.

Tabel 3. 7 Pagu Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.380.503.014	3.222.977.392	95,34
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.999.484	15.999.200	100,00
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.999.484	15.999.200	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.321.165	2.380.119.177	95,08
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.459.088.265	2.337.667.627	95,06
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.072.960	31.292.350	94,62
2.2	Koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	11.159.940	11.159.200	99,99
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.511.412	12.430.150	99,35
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.151.840	8.151.050	99,99
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.359.572	4.279.100	98,15
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.835.205	393.250.188	96,90
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.909.705	158.357.788	92,66
4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.925.500	234.892.400	99,99
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.776.984	354.221.877	95,02
5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.776.984	354.221.877	95,02
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.058.764	66.956.800	95,57
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.058.764	66.956.800	95,57
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.000.399.999	999.666.228	99,93
1	Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.000.399.999	999.666.228	99,93
1.1	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	273.103.297	272.643.912	99,83



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
1.2	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.600.000	3.600.000	100,00
1.3	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	24.562.992	24.462.800	99,59
1.4	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	692.503.710	692.367.016	99,98
1.5	8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	6.630.000	6.592.500	99,43
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	107.865.688	107.832.200	99,97
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	107.865.688	107.832.200	99,97
1.1	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45.677.088	45.644.600	99,93
1.2	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57.867.920	57.867.600	100,00
1.3	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.320.680	4.320.000	99,98
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.126.598.500	1.061.220.500	94,20
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.126.598.500	1.061.220.500	94,20
1.1	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.838.000	178.698.000	90,78



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.664.000	50.664.000	100,00
1.3	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	879.096.500	831.858.500	94,63
V	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57.987.983.832	57.947.792.050	99,93
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	57.987.983.832	57.947.792.050	99,93
1.1	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	64.206.097	58.843.650	91,65
1.2	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	362.325.846	352.601.000	97,32
1.3	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	57.561.451.889	57.536.347.400	99,96
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.745.002.232	2.715.413.000	98,92
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.745.002.232	2.715.413.000	98,92
1.1	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	18.900.000	18.893.600	99,97



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
1.2	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.726.102.232	2.696.519.400	98,91
Total		66.348.353.265	66.054.901.370	99,56

Pada tahun 2024, Bakesbangpol menjalankan 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dalam capaian kegiatan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar "Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun. Thoyyibatun. Wa Robbun Ghofuur)". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mengemban tugas untuk menciptakan stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD yang merupakan salah satu daya tarik investasi.

Dari tabel 3.8 dapat kita lihat bahwa anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 sebesar Rp. 66.348.353.265,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.054.901.370,- atau sekitar 99,56%.

a. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1

Sasaran 1 "Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa" dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial diampu oleh 2 program yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan KarakterKebangsaan dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Realisasi program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial. sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
untuk Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.000.399.999	999.666.228	99,93	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	80%	80%
1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.000.399.999	999.666.228	99,93	Persentase kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	80%	80%
1.1	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	273.103.297	272.643.912	99,83	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	450 orang	450 orang
1.2	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.600.000	3.600.000	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	4 laporan
1.3	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	24.562.992	24.462.800	99,59	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 dokumen	4 dokumen
1.4	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	692.503.710	692.367.016	99,98	Jumlah Paskibraka	72 orang	72 orang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.5	8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	6.630.000	6.592.500	99,43	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	4 dokumen	4 dokumen
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	107.865.688	107.832.200	99,97	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	84%	84%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	107.865.688	107.832.200	99,97	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	84%	84%
1.1	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45.677.088	45.644.600	99,93	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	175 orang	175 orang
1.2	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57.867.920	57.867.600	100,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	225 orang	225 orang



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.3	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.320.680	4.320.000	99,98	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 laporan	3 laporan

I. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa. dengan harapan adanya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Pada tahun 2024. sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 273.103.297,- dan terealisasi sebesar Rp. 272.643.912,- atau 99,83%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota/elemen masyarakat, aparatur



pemerintah serta dunia pendidikan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, rasa nasionalisme serta sejarah perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN) dan meningkatkan pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Aparatur Pemerintah dan generasi muda pelajar melalui sosialisasi pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, sub kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan sehingga tidak terjadi konflik terkait permasalahan suku, etnis dan ras di Kabupaten Blitar melalui fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), fasilitasi Kampung Pancasila, serta Fasilitasi Jejaring Panca Mandala. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan. Pada Tahun 2024, kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan sasaran calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Purna Paskibraka 2023.
- 2) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara Peringatan HUT RI Ke-77, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara.
- 3) Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) meliputi :
 - a. Rapat kelembagaan FPK Kabupaten Blitar;
 - b. Rapat membahas isu - isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar;
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FPK Kabupaten Blitar;

- 4) Fasilitasi Jejaring Panca Mandala yang terdiri dari 5 unsur yaitu :
 - a) Pemerintah Daerah;
 - b) UMKM/ Dunia Usaha;
 - c) Akademisi;
 - d) Organisasi Masyarakat;
 - e) Media Massa/ Pers
- 5) Fasilitasi Kampung Pancasila;



Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Purna Paskibraka Indonesia dan Purna Paskibraka Duta Pancasila dalam program Jejaring Panca Mandala Kab. Blitar pada tanggal 12 Januari 2024 di Ruang Rapat Bakesbangpol



Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024 dengan tema "Bangkit Untuk Indonesia Emas" pada tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar Kanigoro



Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 dengan tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" pada tanggal 1 Juni 2024 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar Kanigoro



Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" pada tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar Kanigoro



Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 dengan tema "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas" pada tanggal 1 Oktober 2024 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar Kanigoro



Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2024 dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju" pada tanggal 19 Desember 2024 bertempat di Aloon-Aloon Pemkab Blitar Kanigoro



Webinar Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Blitar tanggal 7 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpol Kabupaten Blitar

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan di Kabupaten Blitar. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2024 bagi Purnapaskibraka Kabupaten Blitar;
- 2) Pelaporan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
- 3) Pelaporan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.



Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2024 bagi Purnapaskibraka Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Ruang Rapat Perdana Pemkab Blitar

1.3 Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 24.562.992,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.462.800,- atau 99,59%. Pada tahun 2024, output spesifik sub kegiatan ini meliputi rapat dan koordinasi terkait :

- 1) Rekrutment Paskibraka;
- 2) Pelaksanaan kegiatan Paskibraka;
- 3) Pelaksanaan kegiatan Purna Paskibraka;
- 4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka.



Rapat Koordinasi dengan Pelatih dan Pendamping Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2024

1.4 Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 692.503.710,- dan terealisasi sebesar Rp. 692.367.016,- atau 99,98%. Pada Tahun 2024, output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang terdiri dari Rekrutment dan Seleksi;
- 2) Pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pengukuhan Paskibraka



Seleksi Calon Paskibraka Tahun 2024 bertempat di Gedung Serbaguna Pemkab Blitar



Pemberangkatan Calon Paskibraka Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 wakil dari Kabupaten Blitar



Pusdiklat Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2024



Pengukuhan Calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2024

1.5 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.592.500,- atau 99,43%. Pada Tahun 2024, Output spesifik sub kegiatan ini meliputi rapat dan koordinasi pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila terkait :

- 1) Rapat kelembagaan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 2) Rapat pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 3) Rapat Evaluasi Purnapaskibraka Duta Pancasila

II. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa. dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan agama serta keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

di Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 45.677.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.644.600,- atau 99,93%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :

- 1) Pelaksanaan operasi gabungan narkoba berkerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar.
- 2) Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Penumbuhkembangan Jiwa Semangat Nasionalisme Pelajar di Kabupaten Blitar dengan tema “Pemuda Hebat tanpa Narkoba dan Berjiwa Nasionalisme Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”
- 3) Pembinaan dan Fasilitasi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) di Desa Sumberasri Kec. Nglegok dan Desa Karangsono Kec. Kanigoro;
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FKUB Kabupaten Blitar
- 5) Fasilitasi deklarasi damai antar umat beragama dalam rangka sukses Pemilu 2024



Sosialisasi P4GN Tahun 2024



Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FKUB Tahun 2024

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya. dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama. dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 57.867.920,- dan terealisasi 100%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :

- 1) Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :
- 2) Rapat koordinasi dan sosialisasi bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar;
- 3) Rapat kelembagaan FKUB;
- 4) Rapat dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan
- 5) Rakor stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam kesiapsiagaan pangan, budaya dan agama



Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba) Tahun 2024



Rapat Koordinasi Kelembagaan FKUB Tahun 2024

2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.320.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.320.000,- atau 99,98%. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :

- 1) Monitoring, evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga anti Narkoba bekerjasama dengan BNN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2) Pendataan penghayat kepercayaan
- 3) Pemantauan eks pengguna narkoba (bekerjasama dengan Dinkes)

b. Realisasi Anggaran untuk Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 2 “Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat” dengan indikator kinerja Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat diampu oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Realisasi program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat. sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
untuk Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
I	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.126.598.500	1.061.220.500	94,20	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.126.598.500	1.061.220.500	94,20	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%
1.1	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.838.000	178.698.000	90,78	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185 orang	185 orang
1.2	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	50.664.000	50.664.000	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	8 laporan	8 laporan



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah				antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
1.3	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	879.096.500	831.858.500	94,63	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen

I. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di daerah.

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 196.838.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.698.000,- atau 90,78%. Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan



kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, pulbaket deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen.

Pada tahun 2024 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Penolakan terhadap keberadaan tambang galian C di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo karena dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan longsor;
- 2) Penolakan terhadap penyewaan bangunan gereja di Desa Penataran Kecamatan Nglekok
- 3) Penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Bendosewu Kecamatan Talun yang diduga telah diintervensi oleh pihak berkepentingan ;
- 4) Pemblokiran Jalan Raya Jajagan, Desa Jugi oleh Masyarakat Sekitar karena dilewati kendaraan PT. RMI yang melebihi tonase jalan;
- 5) Keracunan Massal di Ponpes Al-Kautsar Srengat;
- 6) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Camat Talun dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 7) Aksi Walkout oleh Paslon Pilkada Kabupaten Blitar dalam Kegiatan Debat Terbuka Kedua;
- 8) Penemuan Tempat Penampungan Calon TKI ilegal di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi;
- 9) Aksi Unjuk Rasa oleh Konsorsium Pembaruan Agraria terkait Percepatan Reforma Agraria;
- 10) Aksi Unjuk Rasa oleh Front Mahasiswa Revolusioner terkait Penertiban Tambang Ilegal;

- 11) Aksi Unjuk Rasa oleh Gerakan Masyarakat Koalisi Peduli Pemilu (Gasak KPU) terkait dugaan keberpihakan penyelenggara dan pengawas pilkada kepada salah satu Paslon

Namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah



Rapat koordinasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intilejen. Pemantauan Orang Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.664.000,- dan terealisasi 100%. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegiatan tim stabilitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk mengambil kebijakan prakonflik, saat konflik dan pasca konflik.

Pada tahun 2024, juga dilaksanakan kegiatan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dan OPD terkait. Melalui kegiatan audiensi dan mediasi tersebut

konflik sosial yang ada di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan dan tidak sampai menimbulkan keresahan yang berlanjut di masyarakat.



Rapat koordinasi terkait permasalahan tambang milik CV. Rizky Alea Casta di Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo



Rapat koordinasi perumusan konsep Surat Edaran Bupati tentang Penyelenggaraan Karnaval / Cek Sound dan Hiburan Keramaian

1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 879.096.500,- dan terealisasi sebesar Rp.

831.858.500,- atau 94,63%. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanganan konflik di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain- lain. Pada tahun 2024 dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial menjelang Pemilu Tahun 2024
2. Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Blitar;
3. Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Persiapan Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2024;
4. Rapat Koordinasi Pengamanan Warga Baru PSHT Cabang Blitar Tahun 2024;



Rapat koordinasi Forkopimda dengan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Blitar

c. Realisasi Anggaran untuk Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis “Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi” dengan indikator kinerja Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi diampu oleh 2 (dua) program yaitu : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Berikut merupakan realisasi program dan kegiatan telah dilakasnakan pada tahun 2024 :

Tabel 3. 10 Realisasi Program dan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGE T	REALI SASI
I	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57.987.983.832	57.947.792.050	99,93	Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemukada	80%	75,62 %
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	57.987.983.832	57.947.792.050	99,93	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	80%	80%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGE T	REALI SASI
1.1	.01.03.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	64.206.097	58.843.650	91,65	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	225 orang	225 orang
1.2	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	362.325.846	352.601.000	97,32	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	225 orang	225 orang
1.3	8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan	57.561.451.889	57.536.347.400	99,96	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	9 laporan	9 laporan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGE T	REALI SASI
	Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah				Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.745.002.232	2.715.413.000	98,92	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	27%	27%
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.745.002.232	2.715.413.000	98,92	Persentase ormas yang dibina	27%	27%
2.1	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.900.000	18.893.600	99,97	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185 orang	185 orang
2.2	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.726.102.232	2.696.519.400	98,91	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 laporan	8 laporan



I. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pada Tahun 2024, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki target 80% dan terealisasi 75,62% sehingga capaian kinerja sebesar 94,52%. Apabila dilihat dari partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, target tersebut sudah terlampaui dengan realisasi sebesar 81,68%, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati hanya terealisasi 69,5%. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain yang terdeteksi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Masyarakat kurang tertarik dengan kedua pasangan calon karena keduanya sudah pernah menjabat sebagai Bupati;
- b. Adanya pemilih yang tidak berada di tempat karena sekolah di luar daerah, pekerja migran, atau kepentingan lain yang menyebabkan ketidakhadiran sedangkan Pilkada cakupannya hanya penduduk yang tercatat sebagai DPT yang berada di Kabupaten tersebut.

Sehingga perbandingan partisipasi masyarakat saat Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan Pemilu dan Pilkada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Perbandingan Partisipasi Masyarakat Saat Pemilu dan Pilkada

Uraian	PEMILU 2024	PILKADA 2024	PEMILU 2019	PILKADA 2020
Jumlah DPT	956.873	963.511	953.840	962.811
Jumlah Pengguna Hak Pilih	781.615	670.337	766.939	645.142
Partisipasi Masyarakat	81.68%	69.57%	80.40%	67.08%
Rata - Rata	$= \frac{\text{Partisipasi Pemilu} + \text{Partisipasi Pilkada}}{2}$ $= \frac{81.68\% + 69.57\%}{2}$ $= 75.62\%$		-	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2024



Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. dimana program ini mengampu Sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 64.206.097,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.843.650,- atau 95.26%.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan :

- 1) Pemberdayaan partai politik melalui workshop keuangan;
- 2) Bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah partai politik tahun 2024 Kabupaten Blitar;
- 3) Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2024 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema “Penguatan Kesadaran Demokrasi Terhadap Pemilih Pemula” yang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (kali) yaitu di SMKN 1



Udanawu, SMKN 1 Kademangan dan sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Paskibraka 2024.



Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Partai Politik Tahun 2024 di Ruang Rapat kantor Bakesbangpol Kab Blitar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024



Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMKN 1 Udanawu, SMKN 1 Kademangan dan sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Paskibraka 2024.



1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 362.325.846,- dan terealisasi sebesar Rp. 352.601.000,- atau 97,32%.

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa :

- 1) Pemberdayaan partai politik melalui komunikasi politik antara masyarakat dan Pemerintah
- 2) Fasilitasi Tim Pemantauan dan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024
- 3) Fasilitasi Tim Desk Pemilukada Tahun 2024
- 4) Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024
- 5) Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu;



Fasilitasi Tim Desk Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Bimbingan Teknis Petugas Aplikasi Desk Pilkada tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Blitar Tahun 2024



Rapat Koordinasi Lintas Sektor Persiapan Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2024

1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 57.561.451.889,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.536.347.400,- atau 99,96%. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa :

1. Verifikasi dan monitoring penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
2. Penyaluran hibah kepada lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyaluran hibah kepada instansi vertikal untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024;
4. Pembayaran Iuran bantuan BPJS Ketenagakerjaan Penyelenggara Pilkada;
5. Penyusunan Naskah Akademis (NA) Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029 Kabupaten Blitar ;
6. Penyusunan Kajian Akademis (KA) usulan kenaikan bantuan Partai Politik Kabupaten Blitar



Verifikasi dan monitoring penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD



Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Akademis Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2029 dan Rencana Kenaikan Dana Hibah Parpol

Tahun 2024 merupakan tahun Pemilu sehingga bantuan partai politik dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Tahap 1 : Bantuan parpol diberikan sesuai dengan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 yang diberikan selama 8 (delapan) bulan, dimana berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Blitar terdapat 9 (sembilan) parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2024 Tahap I.
2. Tahap 2 : Bantuan parpol diberikan sesuai dengan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang diberikan selama 4 (empat) bulan, dimana berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Blitar terdapat 8 (delapan) parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2024 Tahap II.

Adapun rincian peroleh bantuan hibah tahap I dan tahap II disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap I dan Tahap 2

No	Nama Partai	Perolehan Suara Sah Tahun 2019	Perolehan Suara Sah Tahun 2024	Besaran Bantuan Persuara	Jumlah Bantuan yang di Salurkan		Jumlah Anggaran Yang di Cairkan	Ket
					Tahap. I (Sebanyak 8 Bulan sesuai perolehan hasil Pemilu 2019)	Tahap.II Sebanyak 4 Bulan sesuai perolehan hasil Pemilu 2024)		
					Jumlah Anggaran Per Bulan (sesuai perolehan hasil Pemilu 2019) x 8 Bulan	Jumlah Anggaran Per Bluan (sesuai perolehan hasil Pemilu 2019) x 4 Bulan		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	116,153	164,442	3,000	232,306,000	164,442,000	396,748,000	Jumlah Bulan Merujuk pada tanggal pelaksanaan pelantikan
2	Partai Gerindra	90,841	102,044	3,000	181,682,000	102,044,000	283,726,000	
3	PDI Perjuangan	250,570	201,539	3,000	501,140,000	201,539,000	702,679,000	
4	Partai Golongan	47,536	51,859	3,000	95,072,000	51,859,000	146,931,000	
5	Partai Nasional Demokrat	32,462	48,227	3,000	64,924,000	48,227,000	113,151,000	
6	Partai Persatuan Pembangunan	15,721	21,496	3,000	31,442,000	21,496,000	52,938,000	
7	Partai Amanat Nasional	92,881	72,835	3,000	185,762,000	72,835,000	258,597,000	
8	Partai Demokrat	32,822	29,788	3,000	65,644,000	29,788,000	95,432,000	
9	Partai Keadilan Sejahtera	18,562		3,000	37,124,000	-	37,124,000	
Jumlah		697,548	692,230		1,395,096,000	692,230,000	2,087,326,000	



Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Instansi Vertikal Instansi Vertikal Untuk Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Dana Hibah
1.	KPU Kabupaten Blitar	Rp. 11.034.841.800,-
2.	Bawaslu Kabupaten Blitar	Rp. 38.400.000.000,-
3.	Kodim 0808 Biltar	Rp. 1.309.462.000,-
4.	Polres Blitar	Rp. 3.325.942.960,-
5.	Polres Blitar Kota	Rp. 1.054.783.400,-
Total		Rp. 55.125.030.160,-

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. dimana program ini mengampu sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi. Organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek insfrastruktur demokrasi. untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 18.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.893.600,- atau 99,87%. Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan. organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan



memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas
- 2) Konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas
- 3) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- 4) Forum komunikasi ormas dalam rangka cipta kondisi sukses Pemilu serentak tahun 2024

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada tahun 2024, sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.726.102.232,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.696.519.400,- atau 98,91%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan :

- 1) Verifikasi dan monitoring hibah ormas
- 2) Verifikasi dan monitoring hibah instansi vertial
- 3) Fasilitasi rapat koordinasi sengketa ormas;
- 4) Penyaluran dana hibah kepada ormas dan instansi vertikal

Pada tahun 2023, di Kabupaten Blitar terdapat 4 instansi vertikal dan 8 ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Instansi Vertikal Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
1.	POLRES BLITAR	Tahapan Pemilu 2024, Pengamanan Pilkada, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, PAM giat masyarakat, kegiatan SAT INTELKAM, ruang TMC, pengadaan ETLE, kegiatan silaturahmi Kamtibmas, Sewa Kendaraan, Pengadaan Truck R6, untuk Dalmas, pembangunan pagar, rehab teras gedung induk, pengadaan laptop	Rp1,200,000,000	

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
2.	PANGKALAN TNI AU PONGGOK	Hibah barang (Kazenering dan Kendaraan bermotor untuk mess Ponggok Blitar)	Rp. 100.000.000	Teralisasi sebesar Rp. 70.418.000, Dari 37 (tiga puluh tujuh) item yang diajukan dalam proposal, Bakesbangpol hanya bisa menyediakan 24 (dua puluh empat) item hal tersebut dikarenakan usulan pengajuan di SHS seharusnya di tahun n-1 kegiatan, sedangkan hibah barang untuk Pangkalan TNI AU Ponggok merupakan hasil perubahan anggaran tahun 2024 yang semula di rekening hibah uang menjadi hibah barang, sehingga item yang tidak dapat disediakan adalah item yang tidak tersedia di SHS. Sesuai dengan Perbup No. 59 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pengajuan RKBMD harus diajukan pada tahun n-1 kegiatan
3.	POLRES BLITAR KOTA	Rehab gedung, Operasi Mantap Praja Semeru Pilkada	Rp500,000,000	
4.	KODIM 0808	Pengamanan wilayah dan pengamanan Pilkada	Rp500,000,000	
Total			Rp. 2.300.000.000	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. 2024

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran
1.	GP ANSOR Wates	Seminar Kewirausahaan dan Ekspor	Rp30,000,000
2.	PAC Fatayat Binangun	Pengadaan Seragam	Rp15,000,000
3.	NU Ranting Margomulyo Kec Panggungrejo	Pembangunan Gedung NU Ranting Margomulyo Kec Panggungrejo	Rp15,000,000
4.	LP Maarif NU Sutojayan	Pengadaan Alat Drumband dan Seragam	Rp100,000,000
5.	IKA PMII Blitar Raya	Pengadaan Seragam	Rp15,000,000
6.	Muslimat NU Ranting Jatitengah Kec Selopuro	Peruntukan Rehab Aula Muslimat NU Ranting Jatitengah Kec Selopuro	Rp50,000,000



No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran
7.	DPC LVRI Kab Blitar	Pelaksanaan kegiatan organisasi	Rp50,000,000
8.	LP KPK	Dana kegiatan Komnas LP-KPK untuk seminar anti korupsi	Rp100,000,000
Total			Rp 375,000,000

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. 2024

Pada tahun 2024, jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar adalah 145 terdiri dari 139 ormas berbadan hukum (AHU) dan 6 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI)

Tabel Jumlah Ormas Berbadan Hukum yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

No	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah ormas	7	8	7	12	19	17	14	11	139

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. 2023

Pada tahun 2024, di Kabupaten Blitar terdapat penambahan 11 (sepuluh) ormas berbadan hukum baru yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sehingga total ormas berbadan hukum (AHU) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sampai tahun 2024 adalah 139 ormas.

Tabel Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

No	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah ormas	1	2	1	1	1	6

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. 2023

Selain itu juga terdapat penambahan 1 (satu) ormas tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri RI) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kab. Blitar, sehingga total ormas yang tidak berbadan hukum yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol sampai dengan tahun 2024 adalah 6 (enam) ormas.



Rapat Koordinasi Pengesahan Warga Baru PSHT Cabang Blitar Tahun 2024



Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara global hasil pelaksanaan program/kegiatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar tahun 2024 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menunjukkan telah tercapainya indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) indikator sasaran. ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menunjukkan telah tercapainya semua sasaran strategis yang telah ditargetkan. sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99,56% meskipun masih dijumpai adanya beberapa permasalahan. kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang

B. Saran

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin. maka ke depan diperlukan adanya perencanaan. pelaksanaan. pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi tinggi dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;



2. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Blitar tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders. maka faktor kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

C. Rencana Tindak Lanjut dalam Upaya Pencapaian Sasaran

Adapun rencana tindak lanjut dan langkah – langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten guna peningkatan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai Indeks Kesalehan Sosial dari tahun sebelumnya dengan cara membangun koordinasi yang lebih baik dan intens dengan dinas terkait dalam penilaian Indeks Kesalehan Sosial
2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan PHBN dan Paskibraka
3. Peningkatan stabilitas di bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya melalui kegiatan P4GN, FKUB, dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peningkatan penanganan konflik sosial di daerah;
5. Peningkatan pemberdayaan ormas dan fasliitasi ormas;
6. Peningkatan pemberdayaan peran partai politik

Blitar. 28 Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR

Ir. SETIYANA. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680810 199703 1 00



2. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Blitar tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders. maka faktor kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR



Ir. SETYANA, MM.
Pembinia Utama Muda
NIP. 19680810 199703 1 003